

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Aly, Bustoro (2019). *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Media Publishing.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Surabaya: Prenada Media.
- Effendy, M. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*. Jakarta: Balai Pustaka
- Effendi, Tolib. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: PT Media Pressindo.
- Isharyanto, dan Adi Sulistyono. (2018) *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahkamah Agung. (2015). *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Jakarta. 486 Hal
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media

- Moertiono, Moleo R. J. (2023). *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*. Medan: Pustaka Prima.
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana, cetakan kelima*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Renggong, Ruslan. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ridwan H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizal, M. C. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Buku Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Satria, Hariman. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana*. Depok: Rajawali Pers
- Siahaan, Monang. (2017). *Filsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Sinaga, Erlina M.C. dan Oly Viana Agustine. (2021). *Perkembangan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Adb Asis. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wicaksana, Dio A., Adery Ardhan Saputro, Evandri G. Pantouw. (2015). *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Wiyono, R. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustisia, T. V. (2016). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Visi Media

Artikel Dalam Jurnal

- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN: Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.
- Rosita, Dian. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal: Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Gayatri, R. I., Ediwarman, E., Marlina, M., & Trisna, W. (2024). Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah: Wahana Pendidikan*, 10(17), 652-661.
- Harjanto, D. A., & Sukma, D. P. (2024). Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2(2), 103-115.
- Hidayat, N., & Sulastri, S. (2021). Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Yustitia*, 22(1). 58-81
- Kurniyasari, F. N., Firliana, R., & Sucipto, S. (2022). Sistem Informasi Barang Bukti dan Barang Rampasan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia*, 3(2), 120-132.
- Langeningtias, U., Musyaffa'Putra, A., & Nurwachidah, U. (2021). Manajemen pendidikan berbasis madrasah. *Jurnal: Pendidikan Indonesia*, 2(07), 1269-1282.
- Lestari, B. F. K., Kusuma, J. D., & Pramedi, G. (2022). Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Pengamanan Benda Sitaan Sebagai Barang Bukti Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Mataram). *Jurnal Ilmiah: Hospitality*, 11(2), 1193-1204.
- Marnita, M., Hendriyadi, H., & Agustin, E. (2019). Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 11(2), 101-116.

- Mosal, E. D. (2023). Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Jurnal: Lex Privatum*, 11(1), 1-9.
- Prabandaru, I. S. (2018). Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(1), 28-51.
- Purwanto, Komang Ayu T., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. (2019). "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2(2), 113-123.
- Rahman Syamsuddin, A. T. (2021). Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. *Jurnal Aldev: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 223-235.
- Raja, P. J. L., & Simamora, J. (2024). Peranan Kejaksaan Dalam pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 6022-6031.
- Sari, Meita S dan Muhammad Zefri. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308-315.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal: Ilmiah Maksitek*, 3(3), 97-103.
- Sofwan, S. V., & Sulastri, T. (2019). Peran Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Bandung. *Jurnal: Ilmiah Akuntansi FE Unibba*, 10(3), 151-165.
- Sugiarto, T. (2019). Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Negara (RUPBASAN) Probolinggo. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 7(1), 1-15.

Suharso, S. N. R., & Laksana, A. W. (2020). Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang. *Jurnal: Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1(1), 293-309.

Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal: Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

Yohana E.A Aritonang, July Ester, Herlina Manullang. (2022). *Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*, *Jurnal: Nommensen Law Review*, 32(1), 14-27.

Skripsi / Tesis / Disertasi

Agustian, F. (2022). *Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Dan Eksekusi Barang Bukti*. Skripsi (Diterbitkan) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro. Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15781>

Indra, A. (2016). *Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti Yang Disita Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palembang*. Skripsi, (Diterbitkan) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Diakses dari <http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/749>

Pakpahan, Y. A. (2024). *Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Rampasan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika*. Skripsi (Diterbitkan) Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen. Diakses dari <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9931>

Ratnasari, A. (2020). *Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Dari Kejaksaan Bagi Pejabat Lelang Dalam Lelang Sitaan Atau Rampasan*. Tesis (Diterbitkan), Universitas Airlangga. Diakses dari <https://repository.unair.ac.id/105135/>

Silalahi, G. P. (2018). Pertanggungjawaban Kepala Rupbasan Atas Hilangnya Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Uajy). Skripsi (Diterbitkan), Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/16743/1/HK110580.pdf>

Yuliantini, N. P. R. (2014). *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Bali*. Tesis (Diterbitkan) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana. Diakses dari <https://e-perpus.unud.ac.id/repositori/tesis?nim=1190561015>

Artikel Dalam Internet

BPK RI. (2004). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2004*. Diakses pada 18 Januari 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>

Kejaksaan Negeri Buleleng. (2023). *Visi Misi Kejaksaan dan Struktur Organisasi*. Diakses pada 18 Januari 2025, dari <https://kejari-buleleng.kejaksaan.go.id/>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Kejaksaan No. 6 tahun 2017 (PER-006/A/JA/07/2017) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. Diakses pada 19 Januari 2025, dari <https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=2705>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A1JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Penanganan Kasus Pidana Umum.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

